PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA

(Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)

Almira Rahmaveda
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Surabaya city became one of the biggest city in Indonesia and yet still struggle from handling street children problem. Since 2012 untill 2015, the number of street children is fluctuating and hard to handle. Social Department of Surabaya City owns Kampung Anak Negeri Wonerejo Regional Technical Implementatation Unit (UPTD) that worked together with Alang-alang Halfway House and Kharisma Halfway House to support the implementation of empowerement program that will develop the independency of street children.

This study uses qualitative descriptive methods that aims to describe the synergy among stakeholders in the program of street children empowerement in Surabaya. Informants were determined by using purposive sampling technique. They are 19 informants, 3 informants from Social Department of Surabaya City, 3 informants from Kampung Anak Negeri Wonerejo Regional Technical Implementatation Unit, 3 informants from Halfway House, and 10 informants are the street children who have been training. The data were collected by observation, in-depth interview, documentation method and questionnaire to the informants. The data analysis process uses reducing data and draw conclucions. Then the validity of data is tested by using the triangulation to obtain the valid data.

The result shows that the implementation of empowerement program for street children hasn't implemented properly because the principle of equality, participation and sustainbility hasn't been fully implemented. Furthernore, the cooperative relationship between the Social Department of Surabaya City, Kampung Anak Negeri Wonerejo Regional Technical Implementatation Unit (UPTD), Alang-alang Halfway House and Kharisma Halfway House are less synergic. This is due to the lack of intensive interaction among them and lack of active participation in the process of coordinating the planning, implementation and evaluation of empowerement program. Eventually affected the poor growth of independence in the street children who have been training, based on the low level of intellectual independence and learning independence from each street child.

Keywords: *Empowerement, Synergy, Independence*

PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu fenomena permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam penanganan anak jalanan, pemerintah Indonesia memiliki berbagai regulasi dasar, diantaranya yaitu Pasal 34 UUD 1945, Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 bagian kesepuluh, Keppres No. 36 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, UU kesejahteraan anak No.4 Tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988. Selain aspek regulasi, pemerintah Indonesia juga memiliki beragam program yang diberikan kepada anak jalanan. Namun, beragamnya program tersebut tidak berdampak kepada tahap perubahan sosial dalam diri anak jalanan. Anak jalanan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) disebutkan bahwa anak jalanan merupakan satu kelompok anak yang berada dalam kesulitan khusus (*children in especially difficult circumtance*) yang menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Adanya berbagai kebijakan dan program telah membawa dampak positif terhadap tataran mikro, akan tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan pada tataran makro. Berbagai kebijakan dan program dapat memperlambat pertumbuhan anak jalanan, namun belum berpengaruh terhadap pengurangan jumlah anak jalanan.

Di Kota Surabaya, jumlah anak jalanan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah
2012	114
2013	94
2014	76
2015	85

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2015

Munculnya anak jalanan di Kota Surabaya menjadi salah satu fenomena permasalahan sosial yang penting untuk diperhatikan. Untuk menangani permasalahan anak jalanan, Pemerintah Kota Surabaya memiliki Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Perda tersebut, pemerintah Kota Surabaya menandatangani nota kesepakatan/MOU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 2004 untuk mengadakan kerjasama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dengan memprioritaskan pada 5 kategori yang salah satunya yaitu anak jalanan.

Dalam kegiatan pemberdayaan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak rumah singgah. Selain bekerjasama dengan rumah singgah, Dinas Sosial membentuk 5 UPTD, yang dimana 2 UPTD diantaranya menangani permasalahan anak jalanan di Kota Surabaya, yakni UPTD Liponsos Keputih untuk penampungan sementara hasil operasi simpatik anak jalanan dan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah sosial, salah satunya yakni anak jalanan.

Namun, Bentuk pembinaan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya ternyata kurang memberikan dampak perubahan yang signifikan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab dari belum berhasilnya bentuk pemberdayaan tersebut, diantaranya adalah seringkali banyak anak jalanan yang memberontak ketika dihadapkan pada suatu program pembinaan, kurangnya kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan yang nantinya dapat mempekerjakan anak – anak jalanan yang telah diberdayakan, tidak semua pendamping memiliki watak yang sabar, adanya realitas program yang salah sasaran, serta fokus dan besaran masalah sosial yang ditangani serigkali kurang jelas dan akurat, program yang tidak berkelanjutan serta kurang terkoordinasi dengan baik, dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diambil adalah mengenai bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan dilihat dari sinergitas antar *stakeholders* dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya terutama menyangkut pada pelaksanaan prinsip-prinsip pemberdayaan yang meliputi kesetaraan, partisipatif, dan berkelanjutan. Kemudian, untuk mendeskripsikan hubungan sinergisme yang terjalin diantara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan UPTD Kampung Anak Negeri dan rumah singgah Alang-alang serta Rumah Singgah Kharisma berdasarkan atas hubungan komunikasi dan koordinasi. Dan untuk mendeskripsikan karakteristik kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya yang meliputi tiga aspek kemandirian yakni kemandirian sosial, kemandirian intelektual, dan kemandirian belajar. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam pengembangan teori sinergitas antar stakeholders dalam suatu program pemerintah, dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji tentang sinergitas antar stakeholders dalam suatu *project* tertentu khususnya yang berkaitan dengan anak jalanan pada masa yang akan datang, memberikan gambaran bagi Pemerintah Kota Surabaya tentang tingkat sinergisme yang terjalin diantara stakeholder yang terkait dalam usaha meningkatkan kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya, memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan upaya perbaikan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya, dan Dapat memberikan saran atau masukan bagi Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal usaha peningkatan kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan sinergitas yang terjalin diantara stakeholders dalam program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Yang dimana terdiri dari 19 informan, 3 informan berasal dari Dinas Sosial Kota Surabaya, 3 informan berasal dari UPTD Kampung Anak Negeri, dan 3 informan dari rumah singgah, serta 10 informan berasal dari anak jalanan yang mendapatkan pembinaan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, metode dokumentasi, dan pemberian angket kepada para informan. Proses analisis data dilakukan dengan mereduksi data dan juga menarik kesimpulan. Setelah itu validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber data supaya diperoleh data yang absah.

Pemberdayaan Anak Jalanan

Pemberdayaan masyarakat menjadi perlu untuk dilakukan, karena pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan. Ife juga memandang pemberdayaan sebagai cara untuk meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Kemandirian sebagai hasil dari pemberdayaan tidak hanya terbatas pada satu bidang saja, namun mencakup beberapa bidang di dalamnya, seperti yang disebutkan oleh Widjaja yakni meningkatnya kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Konsep mengenai pemberdayaan anak jalanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan anak jalanan dalam masyarakat. Tujuan dilakukannya pemberdayaan terhadap anak jalanan antara lain untuk membantu anak jalanan mencapai tahapan perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksut yakni meningkatkan keberdayaan kelompok anak jalanan, membantu anak jalanan memperoleh kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan yang baik yakni sebagai berikut: Kesetaraan, Partisipatif, dan Berkelanjutan. Kesetaraan yakni prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesejajaran atau kesetaraan diantara berbagai *stakeholder* keseluruhan yang terkait di dalamnya, baik dari sisi pelaksana atau penerima program pemberdayaan. Yang dimana menghargai adanya keragaman, keunikan, dan perbedaan diantara masing-masing individu. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing – masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Sedangkan yang dimaksut dengan partisipatif adalah Dalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (subyek) pembangunan yang aktif, bukan hanya sebagai penerima yang pasif. Hendaknya dalam proses pemberdayaan harus menghargai perbedaaan dan keunikan individu dan menekankan kerjasama masyarakat (*client partnership*). Selain itu, proses pemberdayaan hendaknya memperkuat partisipasi masyarakat dalam semua aspek proses pemecahan masalah dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensialitas warga dalam rangka memobilisasi semangat berpartisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kehidupannya dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Definisi secara tegas menekankan, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus diupayakan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, bukan mempertahankan hubungan ketergantungan antara birokrasi dengan masyarakat. Dan yang dimaksut dengan berkelanjutan adalah Program pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baru baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, yang dimana oleh karena itu proses dan struktur yang dikembangkan itu harus bersifat berkelanjutan. Sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, dengan program yang dibuat secara *continue*, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Pemberdayaan merupakan proses belajar, sehingga diperlukan tindakan konkrit yang *continue* sehingga nantinya dampak perubahan yang diharapkan dapat terlihat.

Sinergitas antar Stakeholders

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu program diantaranya adalah mengenai bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin diantara para pihak yang berhubungan di dalamnya. Pelaksanaan suatu kebijakan/program pemerintah selalu berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, dalam kata lain tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga, agar suatu program dapat berjalan dengan baik, peran dan fungsi yang dimiliki masing-masing bidang harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain.

Stephen R. Covey menjelaskan bahwa sinergi (*Synergy*) merupakan kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan antara angota tim. Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan hasil menakjubkan seperti hal-hal atau alternatif baru yang dahulunya tidak ada.[1]

Richard L. Daft menggambarkan terjadinya sinergitas sebagai kondisi yang muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berinteraksi untuk menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Definisi sejenis juga dikemukakan oleh Thoby Mutis yang berpendapat

[1] Covey, Stephen. 2004. *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Jakarta: Binarupa Aksara. Hal.259.

bahwa sinergitas adalah perpaduan beberapa inti/beberapa elemen yang dipadukan secara bersama memberikan hasil lebih banyak dan lebih baik daripada manakala mereka bekerja sendiri-sendiri.

Untuk mencapai kondisi yang sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih besar, tidak dapat dihindari bahwa terdapat tingkat kebergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Deardorff dan Williams yang menyebutkan bahwa sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama.

Dalam melihat hubungan sinergitas diantara stakeholders, dapat dilihat melalui: hubungan komunikasi antar stakeholders dan koordinasi dalam setiap proses pemberdayaan anak jalanan. Dalam mencapai suatu pola hubungan yang sinergi, salah satu unsur yang perlu di perhatikan adalah komunikasi. Kecakapan yang utama agar tercipta hubungan yang sinergi di dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Salah satu bentuk dari komunikasi yakni seperti pemberian motivasi pada masing-masing bidang/golongan tertentu sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya partisipasi dan membangkitkan perhatian dalam menjalankan pekerjaan, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kartono mendefiniskan komunikasi sebagai kapasitas individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu dan kelompok lain. Yang dimana arus penyampaian informasi dan emosi-emosi berlangsung secara vertikal (atas, bawah, vic-versa) maupun secara horizontal. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan pola hubungan atau persambungan wahana/sarana-sarana.

Pelaksanaan kegiatan komunikasi pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan sasaran yang akan membuat jalinan komunikasi. Jaringan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan akan mewujudkan bentuk komunikasi yang menggambarkan proses dan pelaksanaan komunikasi tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi yang biasa terjadi dalam organisasi yaitu: komunikasi vertikal ke atas dan komunikasi vertikal ke bawah, serta komunikasi horizontal. Sedangkan untuk pola komunikasi, terdiri dari pola komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah.

Disamping adanya komunikasi, dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Myers & Myers komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan kerenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Koordinasi dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-sumber yang digunakan dapat secara efektif dan efisien. Sondang P.Siagian mendefinisikan koordinasi merupakan pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Dan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang ter-integrasi dengan cara yang seefefisien mungkin.

Koordinasi merupakan fungsi organisasi. Dalam sebuah organisasi, koordinasi berlangsung pada setiap level, fungsi (*Planning, Organizing, Activating, Controlling*), dan siklus manajemen. Begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk, koordinasi internal dan eksternal harus jalan. Yang satu berkoordinasi dengan yang lain, atau berbagai kegiatan, program, lembaga, unit kerja, organisasi, dikoordinasikan. Koordinasi dalam perencanaan merupakan Suatu mekanisme yang penting dalam mengkoordinasikan unit-unit atau organisasi-organisasi adalah perencanaan bersama. Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan yang ingin dicapai dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (target) yang diinginkan. Pertimbangan dalam memilih rangkaian tindakan dengan terlebih dulu menganalisa sasaran-sasaran, serta memperhitungkan biaya dan resiko dikaitkan dengan strategi dan kebijaksanaan. Suatu pekerjaan yang akan melibatkan beberapa unit di dalam suatu organisasi atau beberapa instansi di dalam pemerintahan akan dapat dilaksanakan bersama secara tertib dan terkoordinasi apabila pekerjaan tersebut direncanakan dulu bersama-sama. Dengan adanya rencana bersama, maka koordinasi telah dilakukan sejak awal. Hal ini sungguh penting agar setiap pihak yang terlibat dalam mencapai sasaran bersama telah mulai ditertibkan sejak permulaan.

Koordinasi dalam pelaksanaan sangat penting untuk dilakukan, hal itu karena pada dasarnya suatu sistem memiliki bagian-bagian unit yang terkandung di dalamnya, yang di mana setiap unit walaupun mempunyai tugas dan sasarannya sendiri, namun tiap unit tak dapat melepaskan diri dari unit lainnya. Demikian halnya karena suatu unit tak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lain, tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila ingin segalanya berjalan dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar hubungan antar unit dalam proses pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tercipta hubungan yang saling mendukung satu sama lain, koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan atau

program merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dan koordinasi dalam evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Hasil dari evaluasi dimuat ke dalam feedback dan dijadikan masukan balik ke dalam perencanaan kembali. Dalam pelaksanaannya, seorang koordinator perlu selalu mengadakan monitoring dan pengarahan-pengarahan agar pelaksanaan kerja serta aktivitas-aktivitas para pelaksanaannya benar-benar terarah, harmonis, tersatu-padu dan serempak atau menurut urutan-urutannya yang tepat. Koordinasi akan meminta ketaatan, kesetiaan dan disiplin kerja dari setiap pihak yang terlibat. Di siniliah pentingnya pertemuan-pertemuan berkala antar instansi dengan koordinatornya guna mengadakan penilaian-penilaian, melihat bersama apa yang telah dilakukan oleh semuanya, dan pemberian pengarahan-pengarahan yang disusul oleh pembahasan bersama melalui diskusi atau tanya jawab. Dalam kesempatan inilah masalah-masalah yang ditemukan di dalam pelaksanaan kerja akan dicarikan pemecahannya oleh semua pihak secara bersama.

Kemandirian Anak jalanan

Upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dilihat melalui aspek pemberdayaan menurut Payne adalah "*to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capaciy and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.*" Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Gagasan dasar mengenai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat yakni sebagai serangkaian upaya sadar untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan (*development as freedom*), yang diharapkan akan mendukung terjadinya transformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial secara total yang bermuara pada terciptanya masyarakat demokratik.

Mappadjantji Amien menyebutkan bahwa kemandirian lokal adalah menekankan perlunya setiap entitas memelihara dan meningkatkan kualitas kemandiriannya demi untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya dan juga agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan semesta. Pada dasarnya tidak ada tatanan yang memiiki kemandirian yang bersifat absolut, karena senantiasa membutuhkan pertukaran informasi, materi, dan energi dari lingkungannya demi mempertahankan keberlangsungan keberadannya. Kemandirian yang ada hanyalah berkaitan dengan aktivitasnya memilih kiat dalam melakukan peremajaan terhadap identitasnya dan mmilih struktur yang dianggapkan sesuai dengan dinamika lingkungannya. Dengan kata lain, kemandirian dimaksut berkaitan dengan penetapan upaya-upaya yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya. Tegasnya, keberlangsungan keberadaan suatu tatanan tidak semata tergantung pada dinamika lingkungan strategisnya, tetapi tergantung pada tanggapan yang dipilih secara mandiri oleh suatu tatanan. Dengan kata lain, kemandirian tatanan diperlukan karena dengan kemandirian itu suatu tatanan dapat menjaga eksistensi masa depannya.

Sutari, mendeskripsikan bahwa kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu mandiri tanpa bantuan orang lain. Kartasasmita mengemukakan bahwa kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu setiap bangsa dapat menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan perilaku yang terbaik.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang dikemukakan di atas, konsep mengenai kemandirian anak jalanan mengandung pengertian yakni suatu keadaan dimana anak jalanan memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan, kekuasaan, serta pengetahuan yang ada dalam dirinya yang pada akhirnya mampu bertindak dan berfikir sendiri dalam memilih jalan hidupnya dan berkembang lebih baik lagi, serta memiliki prinsip dalam hidupnya sehingga ia akan cukup mampu melakukan aktivitas apapun dalam hidupnya tanpa harus bergantung pada orang lain. Atau singkatnya, anak jalanan yang mandiri adalah anak yang memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan dan kekuasaanya untuk mengembangkan diri secara otonom menuju kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jenis-jenis kemandirian terdiri dari: Kemandirian intelektual, kemandirian sosial, dan kemandirian belajar.

Kemandirian intelektual merupakan individu yang memiliki kemandirian intelektual dalam dirinya cenderung bertindak atas kehendaknya sendiri bukan karena orang lain dan tidak tergantung orang lain, atau dengan kata lain

mampu berpikir dan bertindak secara original, kreatif dan penuh inisiatif. Selain itu mereka memiliki sikap yang progresif dan ulet untuk mengejar prestasi, tekun, dan terencana dalam mewujudkan harapannya. Mereka mampu mengendalikan tindakannya, serta mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Selain itu, mereka memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menerima dirinya dan memperoleh kepuasan usahanya. kemandirian intelektual terlihat melalui seseorang yang cenderung lebih terlatih dan berpengalaman dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemandirian intelektual merupakan kemandirian yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai mental, kemauan keras, sifat jujur, bertanggung jawab, dan bermoral tinggi untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain serta memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai tanggung jawab sosial. Sebagai makhluk sosial, seorang individu tidak dapat berdiri sendiri. Interaksi yang terjadi antar-individu tersebut merupakan suatu hal yang mutlak. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam kepentingannya seorang individu saling membutuhkan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dan sebagai akibat dari hubungan atas dasar kebutuhan tersebut, pada akhirnya terdapat kegiatan yang saling mengadakan hubungan sosial di tengah–tengah masyarakat. Interaksi dalam ekosistem ini pada akhirnya akan melibatkan beberapa pola yakni interaksi antar-individu atau antar-organisme, interaksi antar-populasi serta interaksi antar-komunitas.

Dan kemandirian belajar adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Kemandirian belajar biasa diperoleh seseorang melalui pembinaan keterampilan yang bersifat teknik. Yang dimana perilaku yang berkemandirian belajar diantaranya adalah diwujudkan dengan timbulnya prakarsa dan inisiatif dari masing-masing individu untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan, yakni melalui pengembangan wawasan dan keterampilannya. Yang dimana kondisi tersebut menggambarkan bahwa individu yang bersangkutan menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri. Dengan adanya inisiatif tersebut, maka akan mendorong seorang individu untuk selalu mencari alternatif baru dengan belajar dan menerima hal-hal baru yang dapat mengubah cara berfikir, cara berperilaku, dan cara hidup setiap saat dalam hidupnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data pada bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan yang dijelaskan ke dalam tiga dimensi, yakni dimensi pemberdayaan anak jalanan, dimensi sinergitas antar stakeholders dalam program pemberdayaan anak jalanan, dan dimensi kemandirian anak jalanan. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi pemberdayaan anak jalanan, dalam hal ini dijelaskan melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang terdiri dari kesetaraan, partisipatif, dan berkelanjutan.
   a. Anak jalanan yang mendapatkan pemberdayaan terdiri dari karakteristik dan latar belakang yang beraneka ragam. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dominasi keterlibatan anak jalanan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan anak jalanan perempuan, secara berturut-turut dalam pelatihan kewirausahaan pada tahun 2012 yakni 100 persen, pelatihan salon pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 25 persen, dan pelatihan servis telepon genggam pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sebanyak 90 persen. Selain itu, program pemberdayaan yang diberikan di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo hanya diberikan kepada anak jalanan laki-laki saja.
   b. Anak jalanan tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai program pemberdayaan, sehingga tidak terdapat kegiatan *sharing of knowledge* yang pada akhirnya anak jalanan tidak dapat mengembangkan pola pikirnya dengan baik. Selain itu, keterlibatan anak jalanan dalam pelaksanaan program pemberdayaan juga cukup rendah, seperti pada Rumah Singgah Kharisma hanya berkisar 5 – 10 persen dan di Rumah Singgah Alang-alang hanya berkisar 6,7 – 13,3 persen. untuk program pelatihan, pada tahun 2014 keterlibatan anak jalanan hanya sebesar 26,3 persen, dan pada tahun 2015 hanya sebesar 23,5 %.
   c. Anak jalanan tidak mendapatkan pemberdayaan secara berkala. Dalam satu tahun pelaksanaan pelatihan untuk anak jalanan hanya diselenggarakan selama satu bulan saja. Selain itu, anak jalanan tidak mendapatkan program yang bersifat pengembangan.
2. Dimensi sinergitas antar stakeholders dalam program pemberdayaan anak jalanan
   a. Komunikasi
      Komunikasi tidak dilakukan secara intensif. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara

Dinas Sosial Kota Surabaya dengan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo, Rumah Singgah Alang-alang dan Rumah Singgah Kharisma yaitu komunikasi vertikal ke atas dan komunikasi vertikal ke bawah. Dan pola komunikasi yang dilakukan yakni berupa pola komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah.

b. Koordinasi

Dalam perencanaan program pemberdayaan anak jalanan, Rumah Singgah Alang-alang dan Rumah Singgah Kharisma tidak dilibatkan di dalamnya. Sehingga pertimbangan yang digunakan dalam penentuan program pemberdayaan sangat terbatas. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan, masing-masing stakeholders telah menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, namun mereka belum memiliki program yang serasi atau berkesinambungan antara antara satu program suatu instansi dengan instansi lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan dilaksanakannya program tersebut. Sedangkan dalam evaluasi program pemberdayaan tidak secara intensif diselenggarakan. Terlihat melalui tidak adanya jadwal periodik yang pasti untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut, dan Dinas Sosial Kota Surabaya tidak secara aktif melakukan pengawasan serta penilaian selama pelaksanaan program pemberdayaan berlangsung.

3. Dimensi kemandirian anak jalanan

a. Kemandirian sosial

Anak jalanan memiliki tingkat kemandirian sosial yang tinggi. Terlihat melalui tingginya rasa percaya diri anak jalanan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya.

b. Kemandirian intelektual

Anak jalanan memiliki tingkat kemandirian intelektual yang rendah. Terlihat melalui belum dimilikinya prinsip dan perencanaan hidup ke depan yang cukup kuat, sehingga seringkali anak jalanan mudah terbawa oleh lingkungan di sekitarnya. Selain itu, anak jalanan belum mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menganalisis masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga seringkali anak jalanan tetap berada pada lingkup permasalahan yang sama.

c. Kemandirian belajar

Anak jalanan memiliki tingkat kemandirian belajar yang rendah. Terlihat melalui rendahnya minat anak jalanan untuk mengikuti jalannya proses pelaksanaan program pemberdayaan, dan rendahnya kesadaran akan mengembangkan materi pelatihan yang dimiliki. Selain itu, masih minimnya anak jalanan yang memiliki kesadaran untuk bersekolah.

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Mayarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amien, Mappadjantji. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Amirudin R, Yanti F. 2012. *Tindakan Berisiko Tertular HIV-AIDS Pada AnakJalanan Di Kota Makasar*. Universitas Hasanudin: Fakultas KesehatanMasyarakat.

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak – Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children In Need Of Special Protection).* Surabaya: Airlangga University Press.

Batten, T.R. 1967. *Non Directive Approach in Group and Community Work*. Oxford: Oxford University Press.

Beazley, Harriot. 2003. *Voices from the Margins: Street Children's Subcultures in Indonesia*. Children's Geographies.

Castro, Leonardo F M. *Treatment of Synergy for Transfer Pricing Purposes: Code Secs. 367(d), 482 and 936-A Critical Analysis Based on TAM 200907024 and the Obama Administration's Proposals*.

Covey, Stephen. 2004. *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15).* Jakarta: Binarupa Aksara.

Crosby, B.L. 1992. *Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers*. Washington DC:USAID's Implementing Policy Change Project. No.2.

Daft, Richard. 2002. *Manajemen, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.

Dale S. Deardorff dan Greg Williams. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. USA: Fesserdorff Consultants.

Dean, Jenice.. 2001. *Directing Public Companies: Company Law & the Stakeholder Society*. Great Britain: Cavendish Publishing Limited.

Dennis, Cameron Glen T., Ault Phillip H. And Aggee Warren K.. 2003. *Public Relations: Strategies And Tactic: Seventh Edition*. New York: Allyn & Bacon.